**LAMPIRAN III.1**

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN** **DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

| **No.** | **ASPEK** | **FOKUS** | **No.** | **IKK** | **RUMUS/** **PERHITUNGAN** | **JENIS DATA** | **CAPAIAN KINERJA** | **Keterangan** | **OPD PENGAMPU** | **DATA DUKUNG** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | 6) | (7) | (8) | (9) | (10) |  |
| 1 | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 1 | Keberadaan PERDA IMB | Ada/tidak ada PERDA | Apabila ADA:  Sebutkan legal formalnya.  PERDA Nomor : ------ Tahun ------ tentang -- | Ada/tidak | Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP | DPM PTSP NAKER / DINPERKIM | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 2 | Rasio Rumah ber IMB | Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya | * Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2019, sebanyak ----- unit. * Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2019, sebanyak ------ Unit. | ....... % | Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP | DINPERKIM | * Daftar Rincian yang menunjukan jumlah rumah ber IMB sd Akhir tahun 2019 (minimal per Kecamatan) * Daftar Rincian yang menunjukan jumlah seluruh rumah sd Akhir tahun 2019 (minimal per Kecamatan) |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg Ketertiban Umum | 3 | Keberadaan PERDA tentang Ketertiban Umum | Ada/tidak ada PERDA Ketertiban Umum | Apabila ADA:  Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor: --- ---Tahun ------ tentang ----- | Ada/tidak | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM / SATPOL PP | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg kependudukan | 4 | Pengurusan E-KTP | Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP dibagi Jumlah penduduk yang wajib ber- KTP | * Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP * Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP | ...... % | Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil. | DINDUKCAPIL | Daftar yang menunjukan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP, dan daftar yang menunjukan jumlah penduduk per 31/12/2019 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan ttg kependudukan | 5 | Pengurusan KIA | Prosentase Anak yang sudah memiliki KIA | * Jumlah Anak yang sudah memiliki KIA * Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA | --------% | Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP. | DINDUKCAPIL | Daftar yang menunjukan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KIA, dan daftar yang menunjukan jumlah Anak per 31/12/2019 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum) | 6 | Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk | Jumlah personil Satpol PP pada akhir tahun 2019 dibagi 10.000 penduduk x 100 % | * Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2019, sebanyak = ----- orang * Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah = ----- orang | ... per  10.000  penduduk | Sumber data dari BKD/dinas Dukcapil | SATPOL PP/ BKD / DINDUKCAPIL / | * Daftar Nama Satpol PP (PNS) tahun 2019 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang * Daftar yang menunjukan jumlah penduduk per des 2019 |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Kebijakan bidang Penanganan Bencana | 7 | Keberadaan PERDA tentang Penangangan Bencana | Ada atau tidak ada PERDA Penangangan Bencana | Apabila ADA:  Sebutkan dasar hukumnya.  PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang  ----- (yang mengatur Penanganan  Bencana) | Ada/tidak ada | Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum | BPBD / BAG. HUKUM | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH | Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten | 8 | Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten | Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten | Apabila ADA:  Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ----- | Ada/ tidak ada | Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan | DLH | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
| 2 | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan kepada pemerintah | 9 | Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 13 tahun 2019, | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman :  LPPD Tahun 2019 disampaikan pada  tanggal ---- 2020 sesuai surat pengantar Nomor-------tanggal ------ 2020. | Tepat / tidak tepat | Sumber data dari Bagian Pemerintahan/ Otonomi Daerah | BAG. PEMERINTAHAN | Surat Pengiriman LPPD Tahun 2019 Kepada Gubernur selaku Kepanjangan Dari Pusat |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Penyampaian laporan keuangan dan kinerja | 10 | Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2008 | Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan | Bukti Pengiriman:   * Laporan Keuangan 2019, disampaikan pada tanggal --- 2020 sesuai surat pengantar Nomor -- tanggal --- 2020 * Laporan Kinerja tahun 2019. disampaikan pada tanggal ----- | Tepat/tidak tepat | Sumber data dari Bagian Keuangan | BPPKAD | FC Bukti Penyerahan Laporan Keuangan Kab/Kota TA 2019 kepada BPK RI |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 11 | Pemerintah Daerah yang Memiliki Peraturan tentang Penerapan SPM | Ada atau tidaknya Peraturan tentang penerapan SPM | Apabila ada, sebutkan | Ada atau tidak | Bagian Hukum | BAG. HUKUM | FC cover, hal kedua dan halaman pengesahan perda tsb |
|  | KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH | Hubungan antar daerah | 12 | Kerjasama dengan daerah lain | Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019 | Jumlah MOU yang masih berlaku pada  tahun 2019, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari:   1. MOU dengan ------ tentang kerjasama ------. 2. MOU dengan ------- tentang kerjasama -------. 3. Dst--- | ..... MOU | Sumber data dari Bagian Pemerintahan | BAG. PEMERINTAHAN | Fc Mou |
| 3 | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Sinkronisasi Pelaksanaan pembanguna n nasional dan daerah | 13 | Kesesuaian prioritas pembangunan | Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 2 | * Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak--- prioritas. * Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 Program/agenda prioritas. | ...... % | Sumber data dari BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan | BAPPEDA | FC Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2019 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kewenangan | 14 | Urusan wajib yang diselenggarakan daerah | Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 24 (Jumlah urusan wajib di UU 23/2014) X 100% | Urusan Wajib yang dilaksanakan pada  Tahun 2019 (APBD) = ------ urusan. | ...... % | Sumber data : sesuaikan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2019. | Pemerintahan | Fc LPPD yang menunjukkan adanya Urusan Wajib |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Keuangan | 15 | Waktu penetapan PERDA APBD 2019 | Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2019 | Apabila TEPAT:  Sebutkan dasar hukumnya.  PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang  ----- APBD 2019. (Paling lambat tanggal  31 Desember 2018). | Tepat/ Tidak Tepat | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD | BPPKAD | FC halaman depan (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya Perda Penetapan APBD Murni (induk) TA 2019 |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 16 | Keberadaa PERDA tentang  pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 | Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah | Apabila ADA:  Sebutkan legal formalnya.  PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang --- (pengelolaan keuangan daerah) | Ada/tidak  ada | Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD | BPPKAD | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 17 | Belanja untuk pelayanan dasar | Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja pelayanan dasar APBD Tahun  2019.   1. Urusan Pendidikan Rp. - 2. Urusan Kesehatan Rp. -- 3. Urusan PU dan Penataan Ruang Rp.— 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp – 5. Urusan Trantibum dan Linmas Rp ------ 6. Urusan Sosial Rp   Total Belanja pelayanan dasar Rp. ------- Total Belanja APBD 2019, sebesar Rp. ------- | ...... % | Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi keuangan (pada saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit). | BPPKAD | FC LRA audited atau Perda pertanggungjawaban APBD TA 2019 (untuk urusan pendidikan, kesehatan, LH, PU, Sosial, Naker, UMKM, Kesbangpoldagri, Dukcapil) |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 18 | Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan | Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100% | Belanja Pendidikan dan Kesehatan  APBD Tahun 2019.   1. Urusan Pendidikan Rp. – 2. Urusan Kesehatan Rp. ---   Total Belanja Pend & Kes Rp. ---- | ...... % | Sumber data dari bagian Keuangan | BPPKAD | FC LRA audited atau Perda pertanggungjawaban APBD (untuk urusan pendidikan dan kesehatan) |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Pelayanan Publik | 19 | Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 3 sesuai dengan | Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik | Apabila ADA:  Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor ------  Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik) | Ada/tidak ada | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | FC cover, hal kedua dan halaman pengesahan perda tsb |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kepegawaian | 20 | Ratio PNS terhadap penduduk | Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk | Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019  sebanyak -------- orang.  Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2019 sebanyak -------- orang. | ----- | Pembilang : Sumber data dari BKD Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil | BKD / DINDUKCAPIL | * Daftar jumlah PNS per SKPD per 31 Des 2019 yang ditandatangani pejabat BKD * Daftar jml penduduk dari dukcapil yg di ttd pejabat berwenang |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH |  | 21 | Rasio PNS Memiliki Kualifkasi Pendidikan Tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Tesehatan) | Jumlah PNS Memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal D III dibagi Jumlah PNS dikali 100% | Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)... orang  Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 ... orang  Apabila ADA,  sebutkan nama lengkap dari Sistem database: ------- (tentang kepegawaian) | Ada/tidak | Sumber data dari BKD | BKD | Daftar rincian PNS per SKPD dengan kualifikasi minimal III 3 per 31 Des 2019 yang ditandatangani pejabat BKD |
|  | KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH | Kelembagaan | 22 | Penataan Perangkat Daerah | Jumlah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18/2016 | Jumlah Perangkat Daerah, sbb:   1. Bagian (Setda) = ----- unit 2. Dinas = ----- unit 3. Badan = ----- unit 4. Kantor = ----- unit 5. Rumah Sakit = ----- unit 6. Lembaga Teknis lainya = ----- unit 7. Kecamatan/Distrik = ----- unit   Jumlah Perangkat Daerah = ----- unit | ------- unit | Sumber data dari Bagian Ortala | BAG. ORGANISASI | FC perda ttg SOTK yang di tandatangani pejabat berwenang |
| 4 | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | Produk peraturan perundangan | 23 | PERDA yang ditetapkan | Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2019 | PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak ------ Perda ( Daftar terlampir) | … PERDA | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Nomor dan Tanggal Perda yang diterbitkan tahun 2019 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang |
|  | EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD | RAPERDA yang diajukan tahun berjalan | 24 | RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 | Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2019 | * RAPERDA yang disetujui tahun 2019, sebanyak --- RAPERDA. * RAPERDA yang di usulkan DPRD tahun 2019, sebanyak ------- PERDA. | … % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | * Daftar Raperda yg disetujui * Daftar Raperda yg diusulkan |
| 5 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti | 25 | Keputusan  DPRD yang ditindaklanjuti | Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2019 x 100% | * Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2019, sebanyak------ keputusan. * Keputusan DPRD dalam tahun 2019, sebanyak------ keputusan. | ... % | Sumber data dari Setwan | SETWAN | * Jumlah rekomendasi DPRD tentang LKPJ tA 2018) * data yang menunjukkan tindaklanjut rekomendasi DPRD tentang LKPJ TA 2018 |
| 6 | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindaklanju t keputusan Bupati | 26 | Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti | Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2019 x 100% | * Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak------ keputusan. * Keputusan Bupati tahun 2019 yang di usulkan, sebanyak ------- keputusan. | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Keputusan Bupati/Walikota Tahun 2019 yang ditandatangani pejabat berwenang |
|  | EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN | Tindaklanjut Peraturan Bupati | 27 | Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti | Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak- lanjuti dibagi jumlah Peraturan Bupati dalam tahun 2019 x 100% | * Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2019, sebanyak ------ Per- Bupati. * Peraturan Bupati dalam tahun 2019 sebanyak ------ Per- Bupati. | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2018 yg ditandatangani pejabat berwenang |
| 7 | KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN | PERDA yang dibatalkan | 28 | Jumlah PERDA yang dibatalkan | Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% | Perda yang dibatalkan, sebanyak ------- ,  yang terdiri dari:   1. Perda Nomor -------- Tahun 2019 tentang --- 2. Perda Nomor -------- Tahun 2019 tentang ----- 3. Dst.   Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi  oleh Pemerintah sebanyak ------ | .... % | Sumber data dari Bagian Hukum | BAG. HUKUM | Daftar perda yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat berwenang |
| 8 | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN P UBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | PERDA tentang konsultasi publik | 29 | Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik | Ada/tidak PERDA/PerBup | Apabila ADA,  Sebutkan dasar hukumnya:  PERDA atau Perbup Nomor Tahun -----  tentang ----- (konsultasi publik) | Ada/tidak | Sumber data dari Bagian Hukum/Setwan | BAG. HUKUM / SETWAN | FC halaman muka (cover), halaman ke dua dan halaman yang menunjukan ditandatanganinya perda tsb |
|  | INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN P UBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH | Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik | 30 | Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur) | Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup | Apabila ADA,   * Sebutkan Nama Medianya :------ * Sebutkan Perbup nomor --- tahun ---tentang ------. | Ada/tidak | Sumber data dari Dinas Kominfo | DINKOMINFO | Print Out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda |
| 9 | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Serapan dana perimbangan | 31 | Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan | Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100% | Dana perimbangan yang terserap Tahun  2019 sebesar Rp. ---------  Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2019 sebesar Rp. - | .... % | Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai : Dana Perimbangan |
|  | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Alokasi Belanja pada APBD dari DAU | 32 | Belanja Publik terhadap DAU | Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100% | * Realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp--- * DAU Tahun 2019, sebesar Rp. -------- | .... % | Sumber data berasal dar Realisasi Lapora Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * Belanja Langsung (Realisasi) * DAU Tahun 2019 |
|  | TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL | Alokasi Belanja pada APBD | 33 | Belanja Langsung terhadap total APBD | Total realisasi belanja Langsung dibagi APBD x 100% | * Total realisasi Belanja langsung APBD tahun 2019, sebesar Rp------ * Total realisasi Belanja APBD Tahun 2019, Sebesar Rp……. | .... % | Sumber data berasal dar Realisasi Lapora Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * Total Belanja langsung tahun 2019 (realisasi) * Total Belanja APBD tahun 2019 (realisasi) |
| 10 | INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER- SUMBER PAD | Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 34 | Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) | Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100% | * PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp ------ * Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. ----- | ....  % | Sumber data berasal dar Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019  Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019 |
| 11 | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu) | 35 | Opini BPK terhadap LapKeu Daerah | Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeuDaerah Daerah untuk2 tahun terakhir | * Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: ---- * Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan opini: -------- | Opini tahun2018 = ------  Opini tahun2019= ----- | Opini: 1) WTP/ *unqualified opinion*); 2) WDP/ *qualified opinion*); 3) TMP/ *disclaimer opinion*), atau TIDAK WAJAR TW/*adverse opinion*). Opini LHP Tahun 2018, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda | BPPKAD | FC Halaman depan (cover), halaman pernyataan opini dari BPK atas Laporan Keuangan Kab/Kota tahun 2018 & th 2019 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Besaran SILPA | 36 | Rasio SILPA thdp total pendapatan | Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100% | * SILPA Tahun 2019, sebesar Rp ------- * Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. --- | …. % | Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD). | BPPKAD | * SILPA thdp total pendapatan * Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2019 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Realisasi belanja | 37 | Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja | Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100% | * Realisasi Belanja Tahun 2019, sebesar Rp – * Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp. ------ | …… % | Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD | BPPKAD | Lapkeu audited BPK mengenai anggaran belanja dan realisasi belanja APBD th 2019 |
|  | EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD | Pengawasan Inspektorat Kabupaten | 38 | Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti | Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 | * Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak ------- temuan. * Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak ------- temuan. | .... % | Sumber data dar Inspektorat. Dat merupakan rekomendas dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti. | INSPEKTORAT | Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti **dibagi** dengan temuan BPK RI s.d. tahun 2019 |
| 12 | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peta potensi daerah | 39 | Rasio realisasi PAD 2019 terhadap potensi PAD 4 | Jumlah realisasi PAD 2019 dibagi dengan potensi PAD X 100% | * Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp. * Potensi PAD pada APBD Tahun 2019 APBD Rp ------- | .... % | Sumber data dari BPKAD (target tahunan dalam RPJMD) | BPPKAD | * Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai Realisasi PAD   Potensi PAD yang ada dalam RPJMD |
|  | PENGELOLAAN POTENSI DAERAH | Peningkatan PAD | 40 | Peningkatan PAD | Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2019 - PAD 2018) : PAD 2018 X 100% | * Total PAD pada Tahun 2019 sebesar Rp. --- * Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp.--- | .... % | Sumber data dari BPKAD | BPPKAD | Laporan Keuangan Kab/Kota 2019 setelah Audit BPK RI mengenai PAD 2018 dan 2019 |
| 13 | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Penghargaan | 41 | Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019. | Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2019 | Penghargaan yang diterima, sebanyak -  ---- yang terdiri dari   1. -------. 2. -------. 3. -------. 4. Dst --. | .... Penghargaan | Sumber data dari Bagian Humas dan Perangkat Daerah yang menerima penghargaan | BAG. PROTOKOL DAN KOM. PIMPINAN | FC Piagam, Surat Keputusan dll |
|  | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Pengadaan barang dan jasa | 42 | Keberadaan E-procurement | Ada/Tidak | Apabila ADA  Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan -------- tahun  ------. | Ada/Tidak | Sumber data dari ULP. Data berupa proses E- procurement | BAG. PBJ | Lampirkan Print out proses pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari Pengumuman sampai dengan Penetapan Pemenang. FC halaman depan (cover), halaman pertama dan halaman ditandatanganinya perda tentang E-Procurement |
|  | TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH | Daya saing daerah | 43 | Jumlah persetujuan investasi | Jumlah ijin investasi dalam tahun 2019 | Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019, sebanyak ------- ijin | ... ijin | Sumber data dari Kantor PTSP (PMDN >=200 Juta) | DPM PTSP NAKER | Daftar ijin dan realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh SKPD yg mengelola urusan penanaman modal PemKab/Kota pd tahun 2019 |